

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, kita dapat melihat entitas non-negara memiliki pengaruh terhadap perilaku suatu negara. Greenpeace Indonesia berhasil membangun jaringan yang terstruktur guna menekan Lembaga Hukum dan Pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan terkait upaya ekstraksi Sumber Daya Alam untuk kepentingan bisnis yang berdampak pada kehidupan Suku Awyu. Ini dibuktikan dengan bagaimana upaya Greenpeace Indonesia menggunakan strategi advokasinya dan menjadikan *environmental justice* sebagai basis gerakan mereka.

Berdasarkan analisis strategi advokasi yang dilakukan Greenpeace Indonesia dalam membantu upaya Suku Awyu mencapai *environmental justice* pada rentang tahun 2022-2024 menggunakan konsep TAN, Greenpeace Indonesia telah menggunakan keempat komponen strategi dari konsep TAN – *Information politics*, *Symbolic politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability politics*. Strategi *information politics* dapat diamati melalui publikasi riset, investigasi, dan laporan-laporan resmi mereka baik di situs resmi maupun media sosial mereka. Strategi *symbolic politics* tercerminkan oleh aksi damai yang dilakukan secara bersama-sama dengan Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua dan Suku Awyu di depan lembaga peradilan Mahkamah Agung Indonesia sehingga memperkuat komponen strategi *information politics* dalam meningkatkan kesadaran publik akan isu tanah adat Suku Awyu. Lalu, Strategi *leverage politics* terlihat dari jaringan advokasi yang dibangun Greenpeace Indonesia di mana mereka melibatkan Greenpeace International, Greenpeace Southeast Asia, hingga organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara sehingga menciptakan pola bumerang atau upaya melibatkan aktor di level internasional sebagai penambah kekuatan tekanan terhadap pembuat kebijakan. Sementara strategi *accountability politics* dapat dilihat dari upaya Greenpeace Indonesia menekan pemerintah Indonesia dengan meminta pertanggung jawaban mereka atas komitmen iklimnya seperti upaya menurunkan emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam dokumen negara berupa ENDC.